

LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI
(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN, PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN DAERAH TERTINGGAL,
TRANSMIGRASI, BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA (BMKG),
DAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BNPP/BASARNAS)

Tahun Sidang : 2025 – 2026
Masa Sidang : II
Rapat : Ke – 8
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal : Senin, 1 Desember 2025
Sifat : Terbuka
Pukul : 13.55 WIB s.d 17.02 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V) Gedung Nusantara DPR RI.
Acara :
1. Membahas Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2024.
2. Lain-lain
Ketua Rapat : Ir. Ridwan Bae
Sekretaris : Nina Herlina, S.H
Hadir Anggota : 16 dari 48 orang Anggota Komisi V DPR RI.
Hadir Mitra : Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP/Basarnas) beserta jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 13.55.WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Kepala BMKG dan Kepala BNPP/Basarnas pada hari ini adalah membahas Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2024 dan lain-lain.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Kepala BMKG dan Kepala BNPP/Basarnas untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Dalam rangka tindak lanjut penyelesaian rekomendasi Hasil Pemeriksaan Semester (Hapsem) II Tahun 2024 BPK RI, Komisi V DPR RI mewajibkan BMKG dan BNPP/Basarnas untuk:
 - 1) Memperkuat peran pengendalian internal dan memperbaiki tata kelola pengawasan yang ketat terhadap setiap Program Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta Program Pencarian dan Pertolongan.
 - 2) Menyusun perencanaan (*roadmap*) BNPP/Basarnas terkait sarana prasarana pencarian dan pertolongan secara inklusif berdasarkan *Masterplan*, Renstra serta hasil evaluasi dan monitoring.
 - 3) Memberikan penjelasan yang detail terkait hasil yang belum sesuai rekomendasi BPK RI serta hasilnya disampaikan ke Komisi V DPR RI.
2. Komisi V DPR RI sepakat dengan BMKG dan BNPP/Basarnas untuk:
 - 1) Memperkuat penetapan kebijakan BMKG dalam meningkatkan akurasi informasi peringatan dini bencana dan segera dapat ditindaklanjuti oleh instansi berwenang.
 - 2) Meningkatkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mengurangi risiko cuaca ekstrem dan mendukung kesiapsiagaan masyarakat pada puncak musim hujan.
 - 3) Penerapan waktu tanggap cepat (*quick response time*) dalam setiap peristiwa bencana dengan menjadikan *golden time* sebagai acuan utama dalam Standar Operasional Prosedur (SOP).
 - 4) Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Sekolah Lapang BMKG dan Pembinaan Potensi SAR serta meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana yang lebih memadai.
 - 5) Meningkatkan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pemerintah daerah dalam penanganan masa kedaruratan bencana.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.02.WIB.

Jakarta, 1 Desember 2025

KETUA RAPAT,
ttd

RIDWAN BAE

**KEPALA BADAN METEOROLOGI
KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA,**
ttd

TEUKU FAISAL FATHANI

**KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,**
ttd

MOHAMMAD SYAFII